



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
BALAI PENATAAN RUANG LAUT PADANG

JALAN PERTANIAN SUNGAI LAREH, KELURAHAN LUBUK MINTURUN, PADANG 25175
TELEPON (0751) 497052, FAKSIMILE (0751) 497053
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpripadang@kkp.go.id

Nomor : B.350/BPRL.1/TU.140/IV/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja BPRL Padang
Triwulan I 2026

24 April 2026

Yth. Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
di Jakarta Pusat

Dalam rangka upaya peningkatan akuntabilitas kinerja lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan kepada Ibu Laporan Kinerja Balai Penataan Ruang Laut Padang periode Triwulan I Tahun 2026 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Ibu lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Penataan Ruang
Laut Padang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmat Irfansyah



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

LAPORAN KINERJA

Triwulan I

TAHUN 2026



Balai Penataan Ruang Laut Padang
Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya hingga Laporan Kinerja (LKj) Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang Triwulan I Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi mengenai capaian kinerja BPRL Padang hingga Maret 2026 melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama dengan hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Laporan ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja BPRL Padang kepada para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama triwulan I 2026.

Di samping itu, laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Kritik, masukan, dan saran sangat kami harapkan untuk memperbaiki kekurangan laporan ini. Atas perhatian dan dukungan semua pihak diucapkan terima kasih.

Padang, 24 April 2026
Kepala Balai Penataan Ruang Laut
Padang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dr. Rahmat Irfansyah, M.Si.

Ringkasan Eksekutif

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang secara proposional dan profesional berupaya mencapai hasil yang baik dengan mengutamakan transparansi dan keterbukaan pada setiap kegiatan dengan cara melaporkan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) yang disusun setiap triwulan. LKj BPRL Padang Triwulan I 2026 merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban atas pencapaian dari tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan selama periode tersebut, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai upaya dalam mendukung visi, misi, dan *grand strategy* KKP dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, BPRL Padang menguraikan penjabaran visi misi yang dituangkan dalam kegiatan dan Indikator Kinerja (IK). Oleh karena itu, pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjadi kewenangan BPRL Padang berpedoman pada sasaran strategis yang di turunkan pada IK sebagai target yang akan dicapai selama periode tahun anggaran 2026. Pada tahun 2026, terdapat lima sasaran strategis dan 16 Indikator Kinerja (IK) di lingkup BPRL Padang dengan jangka waktu target bersifat triwulanan dan tahunan.

Lebih lanjut, dilakukan pengukuran capaian kinerja yang dilakukan setiap triwulannya untuk memperoleh gambaran konkret terkait aspek ketercapaian kinerja secara kuantitatif. Adapun pengukuran kinerja ini dilakukan dengan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) melalui laman <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh BPRL Padang periode triwulan I 2026 **adalah 120 (kategori istimewa)**. Berikut disampaikan capaian masing-masing indikator kinerja BPRL Padang triwulan I 2026:

1. Kawasan yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja BPRL Padang dengan target tahunan 2 Kawasan belum diukur capaiannya karena memiliki periode pengukuran tahunan.
2. Persentase Wilayah yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja BPRL Padang dengan target tahunan 80% belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
3. Kawasan yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Zonasi Rinci Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPRL Padang dengan target tahunan 1 Kawasan belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
4. Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Padang dengan target tahunan 75 Jenis belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
5. Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja BPRL Padang dengan target tahunan 100% belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
6. Lokasi yang Telah Dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Padang dengan target tahunan 3 Lokasi belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPRL Padang dengan target tahunan 70 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPRL Padang dengan target tahunan 71,75 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan
9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPRL Padang dengan target tahunan 89,5 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.

10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPRL Padang dengan target 81% telah mencapai 100% pada triwulan I 2026.
11. Laporan SPIP yang Disusun BPRL Padang dengan target tahunan 3 belum memperoleh capaian karena pengukurannya dimulai pada triwulan II 2026.
12. Indeks Profesionalitas ASN BPRL Padang dengan target tahunan 81 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
13. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPRL Padang dengan target tahunan 92 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
14. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BPRL Padang dengan target tahunan 1 inovasi belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPRL Padang dengan target tahunan 65 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
16. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPRL Padang dengan target tahunan 77% belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.

Berdasarkan uraian capaian tersebut, BPSPL Padang telah mencapai seluruh indikator kinerja yang dijadwalkan pada triwulan I 2026 dengan persentase 120%. Hingga triwulan I 2026, transformasi dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang menjadi BPRL Padang belum lengkap sehingga BPRL Padang belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran yang operasional. Atas dasar hal tersebut, BPRL Padang belum memiliki dokumen penganggaran sehingga belum ada realisasi anggaran yang dapat diukur. Selain itu, efisiensi terhadap penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target tersebut belum menunjukkan nilai akhir karena periode pengukurannya yang berlangsung tahunan.

Upaya tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, yang mana ketika unit kerja masih berstatus sebagai BPSPL Padang, telah diwujudkan melalui dialog kinerja dalam menjalani masa transformasi unit kerja menjadi BPRL Padang. Adapun rekomendasi untuk pencapaian kinerja periode selanjutnya adalah terdapat rekomendasi untuk memantau perkembangan kinerja secara berkala.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel.....	ix
I. Pendahuluan	10
1.1 Latar Belakang.....	10
1.2 Tugas dan Fungsi	10
1.3 Perkembangan Lingkungan Kerja Strategis.....	11
1.4 Sistematika Penyajian Laporan	13
II. Perencanaan Kinerja	14
2.1. Rencana Strategis DJPRL 2025 s.d. 2029.....	14
2.2. Ikhtisar Perjanjian Kinerja.....	16
2.3. Postur Anggaran 2026	17
III. Akuntabilitas Kinerja.....	18
3.1. Capaian Kinerja	18
IKU. 1 Kawasan yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja BPRL Padang (Kawasan).....	18
A. Capaian Kawasan yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi	19
B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026.....	19
C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan.....	19
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	19
E. Kegiatan Pendukung.....	19
IKU. 2 Persentase Wilayah yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja BPRL Padang (%).....	19
A. Capaian Persentase Wilayah yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir.....	20
B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026.....	20
C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan.....	20
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	20
E. Kegiatan Pendukung.....	20
IKU. 3 Kawasan yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Zonasi Rinci Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPRL Padang (Kawasan)	20
A. Capaian Kawasan yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Zonasi Rinci Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	20

B.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026.....	21
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan.....	21
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	21
E.	Kegiatan Pendukung.....	21
IKU. 4	Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Padang (Nilai).....	21
A.	Capaian Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.....	22
B.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026.....	22
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan.....	22
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	22
E.	Kegiatan Pendukung.....	23
IKU. 5	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja BPRL Padang (%).....	24
A.	Capaian Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ	24
B.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026.....	24
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan.....	24
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	24
E.	Kegiatan Pendukung.....	25
IKU. 6	Lokasi yang Telah Dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Padang (Lokasi)	25
A.	Capaian Lokasi yang Telah Dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.....	25
B.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026.....	25
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan.....	25
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	25
E.	Kegiatan Pendukung.....	25
IKM. 7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPRL Padang (Nilai)	26
A.	Capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPRL Padang.....	26
B.	Perbandingan Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026	26
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan.....	26
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	26
E.	Kegiatan Pendukung.....	26
IKM. 8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPRL Padang (Nilai)	27
A.	Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPRL Padang	27

B.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026.....	27
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan.....	27
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	27
E.	Kegiatan Pendukung.....	27
IKM. 9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPRL Padang (Nilai).....	28
A.	Capaian Nilai IKPA BPRL Padang	28
B.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026.....	28
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan.....	28
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	28
E.	Kegiatan Pendukung.....	29
IKM. 10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPRL Padang (%) 29	
A.	Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja 29	
B.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026.....	29
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan.....	29
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	29
E.	Kegiatan Pendukung.....	30
IKM. 11.	Laporan SPIP yang Disusun BPRL Padang (Dokumen).....	30
A.	Capaian Laporan SPIP yang Disusun	30
B.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026.....	30
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan.....	30
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	30
E.	Kegiatan Pendukung.....	30
IKM. 12.	Indeks Profesionalitas ASN BPRL Padang (Indeks).....	30
A.	Capaian Indeks Profesionalitas ASN BPRL Padang	31
B.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026.....	31
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III 2025 dengan Target Tahunan.....	31
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	31
E.	Kegiatan Pendukung.....	31
IKM. 13.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPRL Padang (Nilai)	31
A.	Capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPRL Padang	32
B.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026.....	32
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan.....	32

D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	32
E.	Kegiatan Pendukung.....	32
IKM. 14.	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BPRL Padang (Inovasi).....	32
A.	Capaian Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BPRL Padang	33
B.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026.....	33
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan.....	33
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	33
E.	Kegiatan Pendukung.....	33
IKM. 15.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPRL Padang (Nilai).....	33
A.	Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPRL Padang	34
B.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026.....	34
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan.....	34
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	34
E.	Kegiatan Pendukung.....	34
IKM. 16.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPRL Padang (%) 34	
A.	Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan	35
B.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026.....	35
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III 2025 dengan Target Tahunan.....	35
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	35
E.	Kegiatan Pendukung.....	35
3. 2.	Realisasi Anggaran.....	35
IV.	Penutup	36
4.1.	Kesimpulan.....	36
4.2.	Rekomendasi.....	37
4.3.	Tindak Lanjut Rekomendasi	37
LAMPIRAN		38



Daftar Gambar

Gambar 1. Peta Program DJPRL Tahun 2025 s.d. 2029	16
Gambar 2. NKO BPRL Padang Triwulan I 2026	18
Gambar 3. Perkembangan Pelaksanaan Penilaian Teknis KKPRL BPRL Padang	23

Daftar Tabel

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BPRL Padang Tahun 2026.....	16
Tabel 2. Rincian Capaian Kinerja BPRL Padang pada Triwulan I 2026.....	18
Tabel 3. Perbandingan Target dan Capaian IKU 1	19
Tabel 4. Perbandingan Target dan Capaian IKU 2	20
Tabel 5. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3	21
Tabel 6. Perbandingan Target dan Capaian IKU 4	22
Tabel 7. Pelaksanaan Asistensi KKPRL BPRL Padang	23
Tabel 8. Perbandingan Target dan Capaian IKU 5	24
Tabel 9. Perbandingan Target dan Capaian IKU 6	25
Tabel 10. Perbandingan Target dan Capaian IKM 7	26
Tabel 11. Perbandingan Target dan Capaian IKM 8	27
Tabel 12. Perbandingan Target dan Capaian IKM 9	28
Tabel 13. Perbandingan Target dan Capaian IKM 10	29
Tabel 14. Perbandingan Target dan Capaian IKM 11	30
Tabel 15. Perbandingan Target dan Capaian IKM 12	31
Tabel 16. Perbandingan Target dan Capaian IKM 13	32
Tabel 17. Perbandingan Target dan Capaian IKM 14	33
Tabel 18. Perbandingan Target dan Capaian IKM 15	34
Tabel 19. Perbandingan Target dan Capaian IKM 16	35

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang secara proposional dan profesional berupaya mencapai hasil yang baik dengan mengutamakan transparansi dan keterbukaan pada setiap kegiatan dengan cara melaporkan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) yang disusun setiap triwulan. LKj BPRL Padang Triwulan I 2026 merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban atas pencapaian dari tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan selama periode tersebut, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam penyajiannya, laporan ini dilengkapi dengan hasil capaian target dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan BPRL Padang yang berpedoman pada sasaran strategis yang diturunkan dalam bentuk Indikator Kinerja (IK). Adapun hasil capaian kinerja BPRL Padang tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana, prasarana, dan anggaran pendukung kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangan BPRL Padang.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Laut, BPRL Padang sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah naungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan dukungan penyusunan dan peninjauan Kembali perencanaan tata ruang, zonasi, dan kawasan, pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Penataan Ruang Laut adalah:

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang fasilitasi dan dukungan penyusunan dan peninjauan kembali perencanaan tata ruang, zonasi, dan kawasan, pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. pelaksanaan dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan pemodelan data tematik spasial dan nonspasial untuk penyusunan materi teknis muatan ruang laut pada rencana tata ruang wilayah nasional, materi teknis ruang perairan pada rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan dokumen rencana zonasi kawasan antarwilayah;
3. pelaksanaan dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, pemodelan, analisis data, dan perancangan indikasi arahan pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk materi teknis muatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. pelaksanaan dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, pemodelan, analisis data, dan perancangan untuk penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. pelaksanaan dukungan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional dan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. pelaksanaan dukungan pendampingan, verifikasi dokumen, penilaian teknis, dan verifikasi lapangan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;

7. pelaksanaan fasilitasi pencatatan, pengadministrasian, dan pemetaan data kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
8. pelaksanaan fasilitasi pengumpulan data penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, laporan tahunan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, dan perwujudan rencana tata ruang dan rencana zonasi;
9. pelaksanaan dukungan identifikasi pengendalian pemanfaatan ruang laut;
10. pelaksanaan dukungan penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut;
11. pelaksanaan fasilitasi pendampingan teknis masyarakat dan kelompok masyarakat serta identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana untuk efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut;
12. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi dan dukungan penyusunan dan peninjauan kembali perencanaan tata ruang, zonasi, dan kawasan, pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
13. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

BPRL Padang memiliki wilayah kerja meliputi sepuluh (10) Provinsi se-Sumatera yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung. Selain itu, BPSPL Padang juga memiliki satuan pelayanan di Kota Medan, Tanjungpinang, Pekanbaru, dan Bandar Lampung.

Total Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BPRL Padang pada hingga Triwulan III 2025 dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi adalah 62 orang, yang terdiri dari 38 orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 7 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, 8 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, dan 9 orang berstatus sebagai Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP).

1.3 Perkembangan Lingkungan Kerja Strategis

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecilnya yang sangat potensial. Indonesia memiliki *megabiodiversity*, yang mencakup keanekaragaman genetic, spesies, dan ekosistem. Kondisi tersebut memberikan beragam manfaat melalui penyediaan jasa ekosistem, baik penyediaan makanan dan obat-obatan, sebagai penyangga kehidupan ekosistem, serta memberikan beragam manfaat ekonomi jika dikelola secara bijak. Pengelolaan yang bertanggung jawab memberikan *multiplier effect* yang akan mengantarkan pada kondisi lingkungan pesisir dan pulau kecil yang optimal sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang berketahanan pangan, berketahanan iklim dan meningkatkan kesejahteraan.

Wilayah kerja BPRL Padang memiliki karakteristik perairan yang khas. Di bagian barat, khas dengan ekosistem pesisir yang dipengaruhi oleh dinamika perairan Samudera Hindia, sedangkan di bagian timur, khas dengan beragam tipe ekosistem yang dipengaruhi oleh kondisi perairan Selat Malaka. Kondisi tersebut memberikan beragam potensi keanekaragaman hayati yang melimpah. Berikut adalah beberapa potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di wilayah kerja BPRL Padang:

- 1) Perencanaan Ruang Laut
 - a. Enam provinsi dari tujuh provinsi wilayah kerja BPRL Padang telah mencapai proses integrasi RTRW Provinsi,
 - b. Telah terbit 442 perizinan KKPRL di wilayah kerja BPRL Padang dalam kurun waktu 2020 s.d. 2024.

Seiring dengan perkembangannya, potensi yang dimiliki tersebut dapat menghasilkan tantangan dan permasalahan dalam pengelolaannya. Pada saat ini, BPRL Padang memiliki berbagai isu strategis yang menjadi

tantangan dan perlu dijawab melalui berbagai program dan kegiatan. Sebagian tantangan tersebut adalah program dan kegiatan yang belum diselesaikan pada periode sebelumnya dan sebagiannya lagi adalah tantangan terhadap dinamika kebijakan program pembangunan yang semakin kompleks. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

- 1) Banyaknya kepentingan yang memanfaatkan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga terjadi tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya di dalamnya. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan yang kurang memperhatikan daya tampung dan daya dukungnya. Tarik menarik antar beragam kepentingan terhadap ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil menyebabkan beberapa provinsi di wilayah kerja BPRL Padang, menjadi terkendala dalam upaya pengesahan ranperda RZWP3K nya, yang diharapkan mampu menjadi alat pengendalian pemanfaatan potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Dalam rentang waktu 2015–2020, dari 7 Provinsi di wilayah kerja BPRL Padang, 2 di antaranya masih belum dapat disahkan menjadi produk hukum sehingga perlu program akselerasi dan pendampingan yang lebih intensif, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, tantangan secara lebih spesifik, adalah penyelesaian potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang laut diselesaikan melalui Penyusunan rencana zonasi antara kawasan (RZ KAW), rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (RZ-KSNT);
- 2) Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebabkan perubahan tata Kelola terkait pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Salah satunya adalah amanat untuk mengintegrasikan RTRW dan RZWP3K menjadi satu produk hukum tata ruang sebagai rujukan pemanfaatan ruang dan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Proses integrasi tersebut menjadi tantangan untuk dapat diselesaikan melalui program dan kegiatan akselerasi dan pendampingan penyusunannya. Proses integrasi tersebut merupakan suatu terobosan penting dalam melihat ruang perairan dan darat dalam satu persepektif integratif dan holistik. Namun demikian ada banyak penyesuaian substansi dan administrasi sehingga menghasilkan suatu produk hukum yang berkualitas, memenuhi kaidah keberlanjutan dan partisipasi masyarakat;
- 3) Pemanfaatan ruang laut dan potensi sumber daya di dalamnya perlu dikelola melalui mekanisme pengendalian dan pengawasan sehingga pemanfaatannya dapat dipastikan mengikuti koridor keberlanjutan dan kesesuaian dengan rencana tata ruang laut yang disusun. Pengendalian dan pengawasan tersebut dilakukan dengan program dan kegiatan operasionalisasi permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang laut yang diwujudkan melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL);
- 4) Meningkatnya dampak negatif adanya fenomena perubahan iklim menyebabkan permasalahan ketahanan pesisir, diantaranya adalah ancaman abrasi pantai yang dapat merusak ekosistem pesisir serta kerusakan ekosistem terumbu karang akibat adanya *coral bleaching*. Hal ini dilakukan melalui rehabilitasi pesisir dengan program dan kegiatan penanaman mangrove dan pembangunan pelindung pantai serta penguatan ketahanan sosial masyarakat pesisir melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan ekosistem mangrove. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi upaya mitigasi dan adaptasi terhadap adanya fenomena perubahan iklim di pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 5) Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu jalur transportasi laut yang cukup padat. Kondisi tersebut membawa dampak terjadinya peningkatan pencemaran pesisir dan laut dengan meningkatnya intensitas kejadian tumpahan minyak. Kondisi tersebut mengancam keberlanjutan keanekaragaman hayati dan habitatnya. Sehingga perlu adanya program dan kegiatan yang dapat menjawab tantangan dari permasalahan tersebut;

1.4 Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja ini bertujuan untuk menginformasikan capaian kinerja triwulan I pada tahun 2026. Adapun capaian kinerja triwulan I 2026 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja tahun 2026 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum terkait BPRL Padang beserta perkembangan lingkungan kerja strategis.
2. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menyajikan uraian rencana strategis berisi visi dan misi organisasi serta perjanjian kinerja BPRL Padang tahun 2026.
3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja organisasi beserta analisis-analisis pendukungnya.
4. **Bab IV Penutup**, menyajikan simpulan umum serta langkah-langkah strategis pada masa mendatang.
5. **Lampiran**, melampirkan data-data pendukung laporan.

II. Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Strategis DJPRL 2025 s.d. 2029

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan DJPRL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah sekaligus mencerminkan peran DJPRL dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ekonomi biru. Peran tersebut selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan (Permen KP) Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.

Penyusunan Renstra DJPRL mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada keberlanjutan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan diharapkan mampu menjawab tantangan kompleksitas pemanfaatan dan penataan ruang laut. DJPRL merupakan unit organisasi eselon I yang dibentuk melalui restrukturisasi kelembagaan di lingkungan KKP sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan penataan ruang laut yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sebelumnya, fungsi tersebut dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL), namun dinamika pemanfaatan ruang laut yang semakin kompleks, seperti ekspansi kegiatan ekonomi biru, pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan konservasi perairan, serta perkembangan teknologi pemantauan laut menuntut adanya transformasi penataan ulang fungsi kelembagaan.

Transformasi ini tidak hanya bersifat administratif, namun juga merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kelautan nasional, meningkatkan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan ruang laut, memastikan bahwa seluruh aktivitas di laut sejalan dengan prinsip keberlanjutan, perlindungan ekosistem, dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis. Berdasarkan hal tersebut pembentukan DJPRL mencerminkan penguatan orientasi KKP dalam memastikan bahwa pengelolaan ruang laut menjadi instrumen fundamental bagi pengembangan ekonomi biru yang berdaya saing, adaptif terhadap perubahan iklim, dan inklusif bagi masyarakat pesisir.

Visi pembangunan nasional yang ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2025–2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini menekankan bahwa transformasi menuju negara maju hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh komponen bangsa, dengan memanfaatkan fondasi pembangunan yang telah dibangun dalam satu dekade terakhir. Dalam konteks tersebut, pembangunan kelautan dan perikanan memiliki peran strategis tidak hanya sebagai penyedia pangan dan sumber devisa, tetapi juga sebagai pilar ketahanan ekologi, ruang ekonomi masa depan, serta penopang kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sebagai kementerian yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, KKP menetapkan visi 2025–2029, yaitu: “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

KKP mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Misi tersebut disusun untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
- 2) “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;

- 3) “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
- 4) “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

DJPRL sebagai salah satu unit organisasi eselon I yang berperan strategis dalam penataan ruang dan pengelolaan ruang laut di lingkungan KKP, memegang peranan penting dalam melaksanakan Misi KKP ke-2 yaitu “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” dan Misi KKP ke-4 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas”. Dalam dukungan terhadap pelaksanaan misi tersebut, DJPRL menetapkan beberapa misi sebagai berikut:

1) Mewujudkan perencanaan ruang laut yang berkelanjutan untuk mendukung kebijakan ekonomi biru

Melalui penyusunan rencana tata ruang laut atau rencana zonasi untuk memastikan kepastian hukum pemanfaatan ruang laut, mencegah konflik antar sektor, menjaga keberlanjutan ekosistem, serta memasukkan partisipasi bermakna dari masyarakat pesisir, masyarakat adat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah dalam seluruh proses perencanaan dan penataan ruang laut. Selain itu, juga diwujudkan melalui penyediaan data spasial kelautan yang akurat, penataan ruang yang lebih detail melalui penyusunan rencana zonasi rinci hilirisasi kelautan perikanan.

2) Mewujudkan pemanfaatan ruang laut untuk mendukung kebijakan ekonomi biru

Melalui penerapan instrumen PKKPR dan KKPR yang efektif, penerapan teknologi digitalisasi perijinan, skema kerjasama / investasi pemanfaatan ruang antara pemerintah, pemda, masyarakat, dan pelaku usaha untuk mendorong iklim investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi kelautan.

3) Mewujudkan pengendalian pemanfaatan Ruang Laut berbasis RTR/RZ

Memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan ruang, mengimplementasikan perwujudan RTR/RZ, penilaian implementasi KKPR, pemberian insentif dan disinsentif dan penyelesaian sengketa penataan ruang untuk peningkatan kepatuhan dan ketaatan masyarakat dalam penataan ruang laut.

4) Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kolaborasi multipihak dalam penataan ruang laut

Melalui penguatan tata kelola, digitalisasi, peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat pesisir dan adat, serta kolaborasi strategis pentahelix dengan pemerintah/pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, pelaku usaha, dan media.

Untuk menjabarkan visi misi DJPRL Tahun 2025-2029 ke dalam arah kebijakan yang lebih terukur, dirumuskan tujuan DJPRL yaitu memperkuat tata kelola kelautan nasional dan menjadikan penataan ruang laut sebagai instrumen fundamental bagi pengembangan ekonomi biru yang berdaya saing, adaptif, dan berkelanjutan.

Adapun tujuan di atas dijabarkan secara lebih rinci dan implementatif dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Terselenggarakannya perencanaan ruang laut yang berkelanjutan,
- 2) Optimalisasi pemanfaatan ruang laut untuk mendukung implementasi kebijakan ekonomi biru,
- 3) Meningkatnya kepatuhan dalam pemanfaatan ruang laut sesuai dengan RTR/RZ dan KKPR yang telah ditetapkan,
- 4) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kolaborasi multipihak dalam penataan ruang laut.

Sasaran program merupakan perwujudan dari kontribusi DJPRL dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis KKP yakni SS 2 “Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” dan SS 5 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas”. Selain itu, sasaran program merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh DJPRL sebagai suatu outcome/impact dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan DJPRL tahun 2025-2029, DJPRL menetapkan 2 (dua) sasaran program yaitu:

- 1) SP1. "Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir" dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut kewenangan Pemerintah pusat;
 - b. Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - d. Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut; dan
 - e. Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
- 2) SP2. "Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penataan ruang laut" dengan indikator kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PRL.

Sasaran Program DJPRL ini mendukung pencapaian SS 2: Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan SS 5: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas.



Gambar 1. Peta Program DJPRL Tahun 2025 s.d. 2029

2.2. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Dalam upaya mendukung visi, misi, dan *grand strategy* KKP dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL), BPRL Padang memiliki tugas-tugas yang dituangkan dalam kegiatan dan Indikator Kinerja (IK). Oleh karena itu, pelaksanaan Tugas dan kegiatan yang menjadi kewenangan BPRL Padang berpedoman pada sasaran kegiatan yang di turunkan pada IK sebagai target yang akan dicapai selama periode tahun anggaran. Dalam perkembangannya, pada awal tahun 2026 ini terdapat lima (5) sasaran kegiatan dan 16 indikator kinerja yang dimandatkan kepada BPRL Padang. Adapun sasaran kegiatan dan IK tersebut termuat dalam Perjanjian Kinerja BPRL Padang 2026 yang disajikan dalam tabel berikut (secara lengkap ditampilkan dalam Lampiran 1).

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BPRL Padang Tahun 2026

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPRL Padang	1 Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja BPRL Padang (Kawasan)	2
		2 Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja BPRL Padang (%)	80
		3 Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-	1

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		pulau Kecil di wilayah Kerja BPRL Padang (Kawasan)	
2	Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Padang	4 Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Padang (Nilai)	75
3	Terlaksananya dukungan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPRL Padang	5 Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja BPRL Padang (%)	75
4	Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Padang	6 Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Padang (Lokasi)	3
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPRL Padang	7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPRL Padang (Nilai)	70
		8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPRL Padang (Nilai)	71,75
		9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPRL Padang (Nilai)	89,5
		10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPRL Padang (%)	81
		11 Laporan SPIP yang disusun BPRL Padang (Dokumen)	3
		12 Indeks profesionalitas ASN BPRL Padang (Indeks)	81
		13 Nilai keterbukaan informasi publik BPRL Padang (Nilai)	92
		14 Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada BPRL Padang (Inovasi)	1
		15 Nilai pengawasan kearsipan internal BPRL Padang (Nilai)	65
		16 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPRL Padang (%)	77

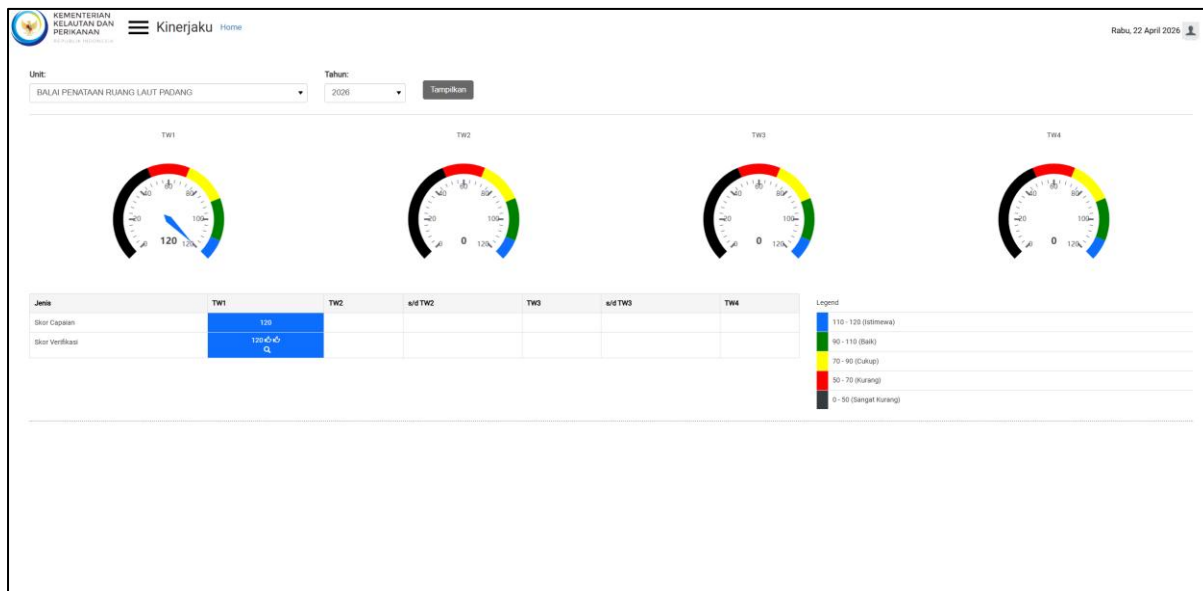
2.3. Postur Anggaran 2026

Saat ini BPRL Padang masih mengalami masa transisi sehubungan dengan adanya transformasi organisasi yang semula adalah Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang. Sehubungan dengan masa transisi yang masih berlangsung, belum adanya anggaran yang melekat pada BPRL Padang yang disebabkan oleh proses administrasi perubahan kode satker dari semula 499346 BPSPL Padang, ke 695348 BPRL Padang.

III. Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BPRL Padang dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Adapun pengukuran kinerja ini dilakukan dengan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) melalui laman <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh BPRL Padang periode triwulan I 2026 adalah **120 (kategori istimewa)**.



Gambar 2. NKO BPRL Padang Triwulan I 2026

Pada tahun 2026 ini, Perjanjian Kinerja BPRL Padang terdiri dari lima (5) sasaran strategis dan 16 indikator kinerja dengan periode capaian triwulanan dan tahunan. Sementara itu, rincian target dan capaian kinerja BPRL Padang pada triwulan I 2026 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Rincian Capaian Kinerja BPRL Padang pada Triwulan I 2026

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I 2026	CAPAIAN TW I 2026	PERSENTASE CAPAIAN (%)
8	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPRL Padang	10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPRL Padang (%)	81	100	123,46 atau 120 berdasarkan SAPK Kinerjaku

IKU. 1 Kawasan yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja BPRL Padang (Kawasan)

Kawasan yang difasilitasi berupa ruang laut nasional, kawasan antar wilayah (KAW), kawasan strategis nasional (KSN), Kawasan strategis nasional tertentu (KSNT). Fasilitas pendampingan penyusunan dan/atau peninjauan kembali dokumen materi teknis ruang laut untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan/atau dokumen Rencana Zonasi KAW dan/atau dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) KSN / materi teknis ruang perairan pada RTR KSN dan/atau dokumen RZ KSNT yang dilakukan melalui dukungan pengumpulan, verifikasi, dan permodelan data tematik spasial dan/atau non spasial. Pencapaian IKU ini diperoleh dari menginventarisasi dan menjumlahkan Kawasan yang telah dilaksanakan pendampingan penyusunan dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang perairan dan/atau rencana zonasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

A. Capaian Kawasan yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi

Rincian target IKU 1 BPRL Padang tahun 2026 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. Perbandingan Target dan Capaian IKU 1

IKU 1. Kawasan yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja BPRL Padang (Kawasan)						
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW I	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025 - TW III 2026	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	2	-

Pada periode triwulan I 2026, belum terdapat capaian terhadap IKU ini karena ditargetkan dengan periode tahunan. Capaian IKU ini didukung oleh pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja BPRL Padang.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026

IKU ini tidak digunakan pada tahun 2025 sehubungan status BPRL Padang sebagai unit kerja baru pada tahun 2026. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian kinerja pada triwulan I.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan I 2026 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor pendukung dalam upaya pencapaian IKU ini adalah upaya pendampingan BPRL Padang yang menyeluruh meliputi pengumpulan data, verifikasi, dan pemodelan data tematik spasial/non spasial. Selain itu, kesesuaian data tematik spasial dan non spasial juga penting untuk diperhatikan agar sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

E. Kegiatan Pendukung

Belum terdapat perkembangan kegiatan pendukung indikator ini karena BPRL Padang sedang menjalani masa transformasi dari BPSPL Padang. Sehubungan hal tersebut, BPRL Padang belum memiliki kode satker anggaran yang operasional.

IKU. 2 Persentase Wilayah yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja BPRL Padang (%)

Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir oleh pemerintah pusat (melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) merupakan wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir yang menyusun Rencana Tata Ruang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi RTRW Provinsi dan/atau Kab/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kab/Kota. Fasilitas pendampingan penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dilakukan melalui dukungan pengumpulan, verifikasi data tematik spasial dan/atau non spasial. Pencapaian IKU ini diperoleh dari persentase pendampingan yang diproses pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah usulan pendampingan yang masuk pada tahun berjalan.

A. Capaian Persentase Wilayah yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir

Rincian target IKU 2 BPRL Padang tahun 2026 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. Perbandingan Target dan Capaian IKU 2

IKU. 2. Persentase Wilayah yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja BPRL Padang (%)						
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW I	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW III 2025 - TW III 2026	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	80	-

Pada periode triwulan I 2026, belum terdapat capaian terhadap IKU ini karena ditargetkan dengan periode tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026

IKU ini tidak digunakan pada tahun 2025 sehubungan status BPRL Padang sebagai unit kerja baru pada tahun 2026. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian kinerja pada triwulan I.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan I 2026 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor pendukung dalam upaya pencapaian IKU ini adalah upaya pendampingan BPRL Padang yang menyeluruh meliputi pengumpulan data, verifikasi, dan pemodelan data tematik spasial/non spasial. Selain itu, kesesuaian data tematik spasial dan non spasial juga penting untuk diperhatikan agar sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

E. Kegiatan Pendukung

Belum terdapat perkembangan kegiatan pendukung indikator ini karena BPRL Padang sedang menjalani masa transformasi dari BPSPL Padang. Sehubungan hal tersebut, BPRL Padang belum memiliki kode satker anggaran yang operasional.

IKU. 3 Kawasan yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Zonasi Rinci Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPRL Padang (Kawasan)

Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil adalah wilayah perairan pesisir dan perairan lainnya yang memiliki potensi sumber daya alam, sosial, lingkungan yang dapat dimanfaatkan secara optimal melalui Perencanaan. Dukungan pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil yang dilakukan Unit Pelayanan Teknis (UPT) adalah melalui dukungan pengumpulan, verifikasi, dan/atau pemodelan data tematik spasial dan non spasial dan/atau profil Kawasan. Pencapaian IKU ini diperoleh dari menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil

A. Capaian Kawasan yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Zonasi Rinci Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Rincian target IKU 3 BPRL Padang tahun 2026 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3

IKU 3. Kawasan yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Zonasi Rinci Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPRL Padang (Kawasan)						
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW I	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025 - TW I 2026	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	1	-

Pada periode triwulan I 2026, belum terdapat capaian terhadap IKU ini. IKU ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026

IKU ini tidak digunakan pada tahun 2025 sehubungan status BPRL Padang sebagai unit kerja baru pada tahun 2026. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian kinerja pada triwulan I.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan I 2026 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor pendukung dalam upaya pencapaian IKU ini adalah upaya pendampingan BPRL Padang yang menyeluruh meliputi pengumpulan data, verifikasi, dan pemodelan data tematik spasial/non spasial. Selain itu, kesesuaian data tematik spasial dan non spasial juga penting untuk diperhatikan agar sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

E. Kegiatan Pendukung

Belum terdapat perkembangan kegiatan pendukung indikator ini karena BPRL Padang sedang menjalani masa transformasi dari BPSPL Padang. Sehubungan hal tersebut, BPRL Padang belum memiliki kode satker anggaran yang operasional.

IKU. 4 Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Padang (Nilai)

Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis adalah hasil dari penjumlahan output dari penyelenggaraan layanan KKPRL yang dilaksanakan oleh UPT. Adapun layanan penyelenggaraan KKPRL yang dilaksanakan oleh UPT meliputi asistensi dan pendampingan permohonan KKPRL, penilaian teknis yang dilaksanakan UPT, verifikasi lapang penilaian teknis, pengumpulan data investasi dan tenaga kerja, dan sosialisasi ke pelaku usaha. Adapun nilai penyelenggaraan KKPRL diperoleh dari perhitungan berikut.

$$\text{Nilai Penyelenggaraan} = ((BA_A \times n) + (LI \& L \times n) + (BA_P \times n) + (BA_V \times n) + (Ls \times n)) \times 100$$

Keterangan:

- BA_A : Jumlah berita acara asistensi dan/atau pendampingan permohonan KKPRL yang dilaksanakan UPT
- BA_P : Jumlah berita acara penilaian teknis KKPRL yang dilaksanakan UPT per penugasan
- BA_V : Jumlah berita acara verifikasi lapang penilaian teknis KKPRL yang dilaksanakan UPT
- $LI \& L$: Jumlah laporan Investasi dan tenaga kerja yang dihasilkan
- Ls : Jumlah Sosialisasi KKPRL yang dilaksanakan UPT

n = bobot nilai, dimana:

$$\begin{aligned} BA_A \times n, \text{nilai } n &= 0,1 \\ L \text{ I\&L} \times n, \text{nilai } n &= 0,25 \\ BA_P \times n, \text{nilai } n &= 0,3 \\ BA_V \times n, \text{nilai } n &= 0,1 \\ Ls \times n, \text{nilai } n &= 0,25 \end{aligned}$$

Penentuan bobot nilai didasarkan pada pengaruh terhadap layanan, frekuensi pelaksanaan kegiatan, proporsi anggaran dan tingkat intervensi masing-masing kegiatan.

Jumlah maksimal yang dapat diklaim adalah sebagai berikut:

- BA asistensi dan/atau pendampingan = 12
- BA penilaian teknis = 36
- BA verifikasi lapangan = 12
- Laporan Investasi = 2
- Jumlah Sosialisasi = 2

A. Capaian Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Rincian target IKU 4 BPRL Padang tahun 2026 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6. Perbandingan Target dan Capaian IKU 4

IKU 4. Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Padang (Nilai)						
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW I	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025 - TW I 2026	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	75	-

Hingga berakhirnya periode triwulan I 2026, belum terdapat perolehan capaian terhadap IKU ini. IKU ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026

IKU ini tidak digunakan pada tahun 2025 sehubungan status BPRL Padang sebagai unit kerja baru pada tahun 2026. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian kinerja pada triwulan I.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan

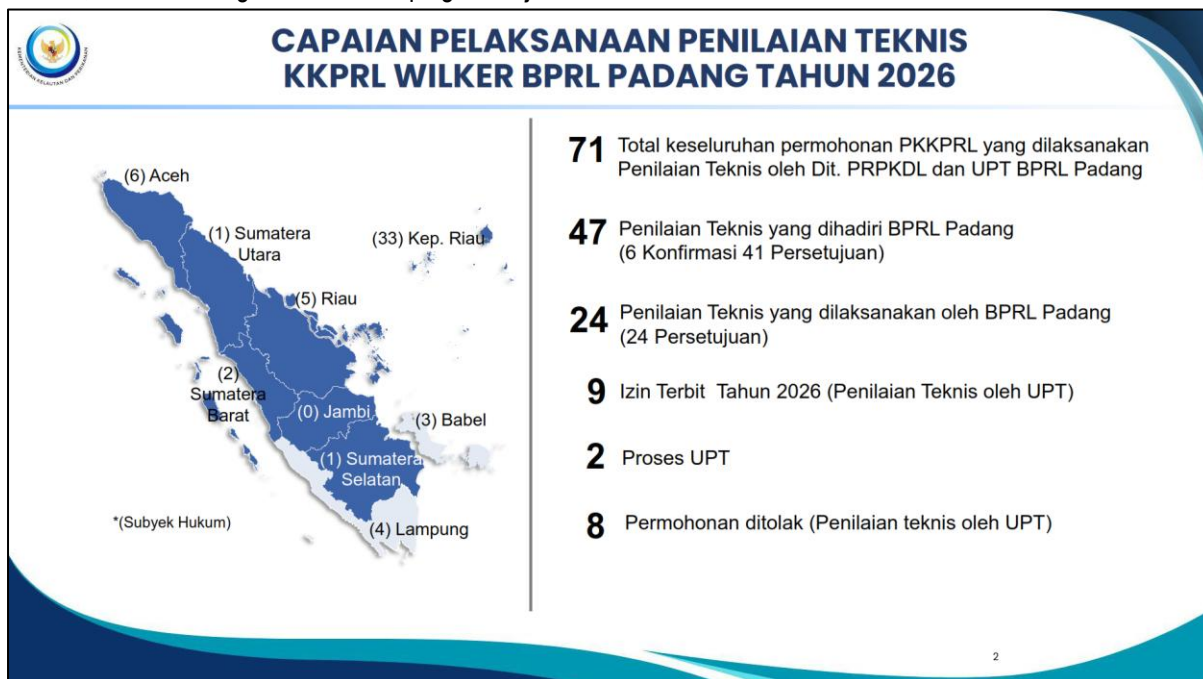
Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan I 2026 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian indikator ini didukung oleh kerja sama pelaku usaha pemanfaat ruang laut yang mengajukan permohonan KKPRL dan keandalan tim penilai penilaian teknis/verifikasi lapangan KKPRL dalam menelaah permohonan yang diterima.

E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pencapaian IKU 4 yang telah terlaksana adalah penilaian teknis KKPRL dan asistensi/pendampingan permohonan KKPRL lingkup BPRL Padang. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan KKPRL lingkup BPRL Padang masih berproses. Sementara itu, dalam hal asistensi pendampingan permohonan KKPRL, BPRL Padang telah mendampingi 8 subjek hukum.



Gambar 3. Perkembangan Pelaksanaan Penilaian Teknis KKPRL BPRL Padang

Tabel 7. Pelaksanaan Asistensi KKPRL BPRL Padang

Nomor	Subjek Hukum	Lokasi yang Dimohonkan	Tanggal Pelaksanaan
1	Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Perairan Teluk Bungus, Kota Padang	5 Januari 2026
2	Komando Daerah Angkatan Laut II	Perairan Teluk Bayur, Kota Padang	12 Februari 2026
3	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatra Barat	Perairan Samudera Hindia, Pulau Pagai Selatan, Kab. Kep. Mentawai	24 Februari 2026
4	Pangkalan Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun	Perairan Laut Natuna, Kabupaten Karimun	8 Maret 2026
5	Komando Armada I Tanjung Pinang	Perairan Laut Natuna, Kota Tanjungpinang	10 Maret 2026
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kep. Mentawai	9 April 2026
7	Sdr. Bausi	Desa Pesisir Timur, Siantan, Kab. Kep. Anambas	14 April 2026
8	Sdr. Joseph Sihol	Desa Saliguma, Kab. Kep. Mentawai	16 April 2026

IKU. 5 Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja BPRL Padang (%)

Monitoring kepatuhan dan evaluasi pemanfaatan ruang laut atas izin KKPRL yang dilaksanakan oleh UPT memiliki indikator pembentuk meliputi penilaian pelaksanaan KKPRL, penilaian laporan tahunan KKPRL, perwujudan RTR/RZ, identifikasi pemanfaatan ruang laut eksisting, dan dukungan data untuk proses penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut.

Adapun perhitungan monitoring dan evaluasi kepatuhan pemanfaatan ruang laut sesuai RTR/RZ yang dilaksanakan oleh UPT adalah sebagai berikut:

$$\Sigma n = \frac{\%V + \%W + \%X + \%Y + \%Z}{\text{Jumlah Indikator Pembentuk}}$$

Keterangan:

- Σn : Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ yang dilaksanakan oleh UPT
- $\%V$: Persentase Data Penilaian Pelaksanaan KKPRL
- $\%W$: Persentase Data Hasil Penilaian Laporan Tahunan KKPRL
- $\%X$: Persentase Jumlah Dokumen RTR/RZ yang dikumpulkan data IPU-nya
- $\%Y$: Persentase Jumlah Provinsi yang telah dilakukan identifikasi pemanfaatan ruang laut eksisting di tahun berjalan
- $\%Z$: Persentase dukungan data untuk proses penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut

A. Capaian Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ

Rincian Target IKU 5 BPRL Padang tahun 2026 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8. Perbandingan Target dan Capaian IKU 5

IKU 5. Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja BPRL Padang (%)						
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW I	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025 – TW I 2026	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	100	-

Pada periode triwulan I 2026, belum terdapat capaian terhadap IKU ini. IKU ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026

IKU ini tidak digunakan pada tahun 2025 sehubungan status BPRL Padang sebagai unit kerja baru pada tahun 2026. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian kinerja pada triwulan I.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan I 2026 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian indikator ini didukung oleh kerja sama pelaku usaha pemilik KKPRL dalam memenuhi kewajibannya dan keandalan tim pelaksana dalam merespon isu pelanggaran/konflik pemanfaatan ruang laut.

E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pencapaian IKU ini yang telah terlaksana antara lain:

1. Penyampaian Usulan Tim Penilai Laporan Tahunan kepada Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut,
2. Asistensi penyusunan laporan tahunan kepada pemilik izin KKPR,
3. Penyampaian usulan 40 subjek hukum yang dinilai pelaksanaan KKPR,
4. Pendampingan PSDKP Lampulo atas indikasi pelanggaran pemanfaatan di Teluk Bayur, Kota Padang,
5. Dukungan data dan informasi kepada PSDKP Lampulo atas indikasi pelanggaran pemanfaatan di Kawasan Pelabuhan BAAI Bengkulu.

IKU. 6 Lokasi yang Telah Dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Padang (Lokasi)

Identifikasi Pemahaman Masyarakat dilakukan melalui survei dan focus group discussion pemahaman penataan ruang laut kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Pencapaian IKU ini diperoleh dari menjumlahkan lokasi (kabupaten/kota yang memiliki pesisir) yang telah dilaksanakan identifikasi pemahaman masyarakat penyelenggaraan penataan ruang laut.

A. Capaian Lokasi yang Telah Dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Rincian target IKU 6 BPRL Padang tahun 2026 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 9. Perbandingan Target dan Capaian IKU 6

IKU. 6. Lokasi yang Telah Dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Padang (Lokasi)						
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW I	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW III 2025 – TW III 2026	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	3	-

Belum terdapat capaian IKU ini pada triwulan I 2026. Pencapaian IKU ini ditargetkan tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026

IKU ini tidak digunakan pada tahun 2025 sehubungan status BPRL Padang sebagai unit kerja baru pada tahun 2026. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian kinerja pada triwulan I.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan I 2026 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKU ini didukung oleh partisipasi masyarakat dalam survei dan *focus group discussion* identifikasi pemahaman Masyarakat terkait penyelenggaraan penataan ruang laut.

E. Kegiatan Pendukung

Belum terdapat perkembangan kegiatan pendukung indikator ini karena BPRL Padang sedang menjalani masa transformasi dari BPSPL Padang. Sehubungan hal tersebut, BPRL Padang belum memiliki kode satker anggaran yang operasional.

IKM. 7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPRL Padang (Nilai)

Nilai PM SAKIP Level II dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Level II di lingkungan Ditjen PRL. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen PRL, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretaris Ditjen PRL.

Adapun kategori nilai PM SAKIP antara lain sebagai berikut:

1. predikat AA dengan nilai >90-100 dengan kategori Sangat Memuaskan;
2. predikat A dengan nilai >80-90 dengan kategori Memuaskan;
3. predikat BB dengan nilai >70-80 dengan kategori Sangat Baik;
4. predikat B dengan nilai >60-70 dengan kategori Baik;
5. predikat CC dengan nilai >50-60 dengan kategori Cukup;
6. predikat C dengan nilai >30-50 dengan kategori Kurang;
7. predikat D dengan nilai 0-30 dengan kategori Sangat Kurang.

A. Capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPRL Padang

Rincian target IKM 7 BPRL Padang tahun 2026 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 10. Perbandingan Target dan Capaian IKM 7

IKM. 7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPRL Padang (Nilai)						
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW I	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025 – TW III 2026	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	70	-

Belum terdapat capaian IKM ini pada triwulan I 2026. Pencapaian IKU ini mulai ditargetkan tahunan.

B. Perbandingan Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026

IKM ini tidak digunakan pada tahun 2025 sehubungan status BPRL Padang sebagai unit kerja baru pada tahun 2026. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian kinerja pada triwulan I.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan I 2026 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian IKM ini dapat didukung oleh adanya harmonisasi antara tim pengelola kinerja, dari sub-tim perencanaan, pengukuran, evaluasi, hingga pelaporan. Selain itu, pemahaman tim pengelola kinerja mengenai aspek-aspek evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga diperlukan agar pencapaian nilai dapat maksimal.

E. Kegiatan Pendukung

Keberhasilan capaian IKM ini dapat didukung oleh adanya harmonisasi antara tim pengelola kinerja, dari sub-tim perencanaan, pengukuran, evaluasi, hingga pelaporan. Selain itu, pemahaman tim pengelola kinerja mengenai aspek-aspek evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga diperlukan agar pencapaian nilai dapat maksimal.

IKM. 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPRL Padang (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

- 1) Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
- 2) Baik, apabila NKPA >80 – 90;
- 3) Cukup, apabila NKPA >60 – 80;
- 4) Kurang, apabila NKPA >50 – 60;
- 5) Sangat Kurang, apabila NKPA ≤ 50

A. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPRL Padang

Rincian target IKM 8 BPRL Padang tahun 2026 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 11. Perbandingan Target dan Capaian IKM 8

IKM. 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPRL Padang (Nilai)						
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW I	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025 – TW I 2026	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	71,75	-

Belum terdapat capaian IKM ini pada triwulan I 2026. Pencapaian IKM ini ditargetkan tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026

IKM ini tidak digunakan pada tahun 2025 sehubungan status BPRL Padang sebagai unit kerja baru pada tahun 2026. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian kinerja pada triwulan I.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan I 2026 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini juga didukung dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan aspek penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.

E. Kegiatan Pendukung

Belum terdapat perkembangan kegiatan pendukung indikator ini karena BPRL Padang sedang menjalani masa transformasi dari BPSPL Padang. Sehubungan hal tersebut, BPRL Padang belum memiliki kode satker anggaran yang operasional. Saat ini sedang berlangsung proses administrasi perubahan kode satker dari semula 499346 BPSPL Padang, ke 695348 BPRL Padang.

IKM. 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPRL Padang (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Adapun indikator penilaian IKPA adalah sebagai berikut:

1. Revisi DIPA, bobot 10%,
2. Deviasi RPD, bobot 15%,
3. Penyerapan Anggaran, bobot 20%,
4. Belanja Kontraktual, bobot 10%,
5. Penyelesaian Tagihan, bobot 10%,
6. Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%,
7. Dispensasi SPM, pengurang nilai IKPA,
8. Capaian output, bobot 25%.

A. Capaian Nilai IKPA BPRL Padang

Rincian target IKM 9 BPRL Padang tahun 2026 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 12. Perbandingan Target dan Capaian IKM 9

IKM 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPRL Padang (Nilai)						
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW I	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025 - TW I 2026	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	89,5	-

Hingga berakhirnya triwulan I 2026, belum terdapat perolehan capaian terhadap IKM ini. IKM ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026

IKM ini tidak digunakan pada tahun 2025 sehubungan status BPRL Padang sebagai unit kerja baru pada tahun 2026. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian kinerja pada triwulan I.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan I 2026 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Upaya pencapaian IKM ini didukung dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan indikator penilaian. Dalam hal ini, kedisiplinan, konsistensi, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam unsur-unsur pelaksanaan anggaran sangat penting dalam pencapaian nilai IKPA yang baik. Dalam pelaksanaan anggaran, acapkali ditemukan permasalahan-permasalahan yang dapat menyebabkan penurunan nilai IKPA. Untuk mengatasi hal tersebut, tim pengelola keuangan dapat melakukan monitoring secara berkala, khususnya dalam hal menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan. Dengan adanya sistem monitoring tersebut, permasalahan yang ditemukan dapat diatasi dan dimonitor perkembangan tindak lanjutnya.

E. Kegiatan Pendukung

Belum terdapat perkembangan kegiatan pendukung indikator ini karena BPRL Padang sedang menjalani masa transformasi dari BPSPL Padang. Sehubungan hal tersebut, BPRL Padang belum memiliki kode satker anggaran yang operasional. Saat ini sedang berlangsung proses administrasi perubahan kode satker dari semula 499346 BPSPL Padang, ke 695348 BPRL Padang.

IKM. 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPRL Padang (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BPRL Padang sampai dengan waktu pengukuran. Data capaian tindak lanjut rekomendasi pengawasan dirilis melalui surat dari Sekretaris Ditjen PRL.

Capaian ini dihitung berdasarkan formula berikut.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$$

A. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja

Rincian target IKM 10 BPRL Padang tahun 2026 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 13. Perbandingan Target dan Capaian IKM 10

IKM. 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPRL Padang (%)						
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW I	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025 - TW I 2026	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK
-	81	100	123,46% atau 120% berdasarkan SAPK Kinerjaku	-	81	123,46% atau 120% berdasarkan SAPK Kinerjaku

Capaian IKM ini pada triwulan I 2026 adalah 100% dari target 81%. Dengan capaian tersebut diperoleh persentase capaian 123,46% atau 120% berdasarkan SAPK Kinerjaku.

Data dukung:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Etf_qPj95AKVPAq5P-LN7p8vUlxv_4Tm

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026

IKM ini tidak digunakan pada tahun 2025 sehubungan status BPRL Padang sebagai unit kerja baru pada tahun 2026. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian kinerja pada triwulan I.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan

Capaian IKM ini pada triwulan I 2026 telah menghasilkan persentase capaian 123,46% atau 120% berdasarkan SAPK Kinerjaku dibandingkan dengan target tahunan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM ini didukung oleh adanya monitoring menyeluruh terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap BPRL Padang.

E. Kegiatan Pendukung

Keberhasilan pencapaian IKM ini dapat ditunjang oleh adanya upaya pendampingan oleh APIP terhadap kegiatan di BPRL Padang. Dengan adanya pendampingan tersebut, ke depannya BPRL Padang dapat meminimalisir jumlah temuan pada kegiatan serupa.

IKM. 11. Laporan SPIP yang Disusun BPRL Padang (Dokumen)

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL. Laporan SPIP triwulanan adalah laporan yang disusun pada periode triwulan I tahun 2026 sampai dengan triwulan III tahun 2026

A. Capaian Laporan SPIP yang Disusun

Rincian target IKM 11 BPRL Padang tahun 2026 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 14. Perbandingan Target dan Capaian IKM 11

IKM 11. Laporan SPIP yang Disusun BPRL Padang (Dokumen)						
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW I	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025 - TW I 2026	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	3	-

Pada periode triwulan I 2026, belum terdapat capaian terhadap IK ini. IK ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode triwulanan namun pengukurannya dimulai pada triwulan II 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026

IKM ini tidak digunakan pada tahun 2025 sehubungan status BPRL Padang sebagai unit kerja baru pada tahun 2026. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian kinerja pada triwulan I.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan I 2026 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini didukung dengan adanya kegiatan pengendalian rutin, berkala, dan Manajemen Risiko dalam pengendalian intern di lingkup BPRL Padang. Sementara itu, untuk memetakan faktor-faktor risiko yang kemungkinan terjadi, dilakukan FGD Manajemen Risiko. Pengendalian Risiko Kegiatan BPRL Padang dibuat berdasarkan hasil masukan dari pelaksana kegiatan kemudian hasilnya dikoordinasikan untuk diantisipasi dan dijadikan bahan masukan dalam persiapan kegiatan.

E. Kegiatan Pendukung

Pencapaian IKM ini didukung dengan implementasi pengendalian intern dan manajemen risiko dalam pelaksanaan kegiatan dengan menyertakan data dukung yang dilaporkan secara berkala. Lebih lanjut, BPRL Padang juga menerapkan implementasi penguatan integritas dan pemantauan risiko secara berkala dan menyeluruh.

IKM. 12. Indeks Profesionalitas ASN BPRL Padang (Indeks)

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: kualifikasi, kompetensi, kinerja, disiplin.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen).
- Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen).
- Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen).
- Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin

A. Capaian Indeks Profesionalitas ASN BPRL Padang

Rincian target IKM 12 BPRL Padang tahun 2026 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 15. Perbandingan Target dan Capaian IKM 12

IKM. 12 Indeks Profesionalitas ASN BPRL Padang (Indeks)						
Realisasi Triwulan I 2025	Tahun 2026					
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025 - TW I 2026	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	81	-

Pada periode triwulan I 2026, belum terdapat capaian terhadap IK ini. IK ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026

IKM ini tidak digunakan pada tahun 2025 sehubungan status BPRL Padang sebagai unit kerja baru pada tahun 2026. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian kinerja pada triwulan I.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III 2025 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan I 2026 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini didukung dengan adanya kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat diikuti pegawai. Setiap pegawai dapat memenuhi pengembangan kompetensinya secara maksimal melalui kegiatan pengembangan diri yang tersedia secara luring dan daring untuk mendorong perolehan Indeks Profesionalitas ASN BPRL Padang.

E. Kegiatan Pendukung

Pencapaian IKM ini didukung oleh keaktifan pegawai dalam mengikuti pengembangan kompetensi workshop/diklat yang diinput ke dalam SIASN.

IKM. 13. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPRL Padang (Nilai)

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa movev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Adapun penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023.

Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu:

- 1) Mengumumkan informasi publik
- 2) Menyediakan informasi publik
- 3) Sarana dan Prasarana
- 4) Kelembagaan
- 5) Digitalisasi

A. Capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPRL Padang

Rincian target IKM 13 BPRL Padang tahun 2026 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 16. Perbandingan Target dan Capaian IKM 13

IKM. 13. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPRL Padang						
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW I 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025 - TW I 2026	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	92	-

Hingga berakhirnya triwulan I 2026, belum terdapat perolehan capaian terhadap IKM ini. IKM ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026

IKM ini tidak digunakan pada tahun 2025 sehubungan status BPRL Padang sebagai unit kerja baru pada tahun 2026. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian kinerja pada triwulan I.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan I 2026 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini didukung oleh pengelolaan website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan media sosial BPRL Padang dalam menyampaikan informasi publik sesuai dengan aspek penilaian yang ditetapkan.

E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pencapaian IKM ini yang telah dilaksanakan adalah pengumpulan data dukung monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.

IKM. 14. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BPRL Padang (Inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi

elayanan publik yang ada. Pencapaian IKM ini diperoleh dari perhitungan jumlah proposal Inovasi pelayanan Publik yang ditetapkan dalam berita acara penilaian oleh Tim Penilai Inovasi pelayanan Publik Ditjen PRL.

A. Capaian Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BPRL Padang

Rincian target IKM 14 BPRL Padang tahun 2026 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 17. Perbandingan Target dan Capaian IKM 14

IKM. 14. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BPRL Padang (Inovasi)						
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW I	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025 - TW I 2026	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	1	-

Hingga berakhirnya triwulan I 2026, belum terdapat perolehan capaian terhadap IKM ini. IKM ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026

IKM ini tidak digunakan pada tahun 2025 sehubungan status BPRL Padang sebagai unit kerja baru pada tahun 2026. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian kinerja pada triwulan I.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan I 2026 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM ini didukung oleh penerapan inovasi pelayanan publik di BPRL Padang yang kontinyu dan terus menerus mengalami perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan.

E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pencapaian IKM ini yang telah terlaksana Adalah pembentukan tim inovasi pelayanan publik lingkup BPRL Padang.

IKM. 15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPRL Padang (Nilai)

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit eselon I diperoleh dari nilai unit pengolah.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 70%)
 - a. penciptaan arsip (20%),
 - b. penggunaan arsip (20%),
 - c. pemeliharaan arsip (35%),
 - d. penyusutan arsip (25%).
2. Sumber daya kearsipan (bobot 30%)

- sumber daya manusia kearsipan (50%),
- prasarana dan sarana (50%).

A. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPRL Padang

Rincian target IKM 15 BPRL Padang tahun 2026 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 18. Perbandingan Target dan Capaian IKM 15

IKM. 15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPRL Padang (Nilai)						
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW I 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025 - TW I 2026	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	65	-

Pada periode triwulan I 2026, capaian IKM ini belum diperoleh karena IKM ini dijadwalkan tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026

IKM ini tidak digunakan pada tahun 2025 sehubungan status BPRL Padang sebagai unit kerja baru pada tahun 2026. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian kinerja pada triwulan I.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan I 2026 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini didukung oleh pengelolaan arsip yang memenuhi kriteria penilaian. Dalam hal ini, pengelolaan arsip yang selaras didukung oleh sumber daya manusia dan sarana yang menunjang pengelolaan arsip.

E. Kegiatan Pendukung

Pengelolaan arsip didukung dengan kecakapan dan keterampilan arsiparis dalam pengelolaan arsip. Selain itu, pemahaman pegawai BPRL Padang dalam menggunakan fitur Korespondensi pada aplikasi *Portal Collaboration Office* dalam persuratan juga dapat mendukung pengelolaan arsip lingkup BPRL Padang.

IKM. 16. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPRL Padang (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Perhitungan persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP adalah:

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

A. Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan

Rincian target IKM 16 BPRL Padang tahun 2026 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 19. Perbandingan Target dan Capaian IKM 16

IKM. 16. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPRL Padang (%)						
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW I	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025 - TW I 2026	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	77	-

Tidak terdapat realisasi capaian IKM 16 pada triwulan I 2026 karena indikator ini memiliki frekuensi pengukuran tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2026

IKM ini tidak digunakan pada tahun 2025 sehubungan status BPRL Padang sebagai unit kerja baru pada tahun 2026. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian kinerja pada triwulan I.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III 2025 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan I 2026 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini didukung dengan pembaharuan pada aplikasi SIRUP secara berkala. Selain itu, pembaharuan yang dilakukan juga perlu memperhatikan dinamika yang terjadi, seperti akun-akun anggaran yang terdampak blokir akibat efisiensi anggaran.

E. Kegiatan Pendukung

Belum terdapat perkembangan kegiatan pendukung indikator ini karena BPRL Padang sedang menjalani masa transformasi dari BPSPL Padang. Sehubungan hal tersebut, BPRL Padang belum memiliki kode satker anggaran yang operasional. Saat ini sedang berlangsung proses administrasi perubahan kode satker dari semula 499346 BPSPL Padang, ke 695348 BPRL Padang.

3. 2. Realisasi Anggaran

Hingga triwulan I 2026 berakhir, BPRL Padang belum memiliki anggaran yang melekat dengan kode satker baru 695348 pasca transformasi dari organisasi sebelumnya, yaitu BPSPL Padang. Sehubungan hal tersebut, belum terdapat realisasi anggaran di lingkup BPRL Padang.

IV. Penutup

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengukuran kinerja hingga periode Triwulan I 2026, terdapat 16 Indikator Kinerja (IK) di lingkup BPRL Padang dengan jangka waktu target bersifat triwulanan dan tahunan yang juga disampaikan perkembangan kegiatannya. Adapun hasil pengukuran kinerja menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://kinerjaku.kkp.go.id/> menunjukkan **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh BPRL Padang pada triwulan I 2026 adalah 120 (kategori istimewa).**

Berikut disampaikan capaian masing-masing indikator kinerja BPRL Padang pada triwulan I 2026:

1. Kawasan yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja BPRL Padang dengan target tahunan 2 Kawasan belum diukur capaiannya karena memiliki periode pengukuran tahunan.
2. Persentase Wilayah yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja BPRL Padang dengan target tahunan 80% belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
3. Kawasan yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Zonasi Rinci Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPRL Padang dengan target tahunan 1 Kawasan belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
4. Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Padang dengan target tahunan 75 Jenis belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
5. Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja BPRL Padang dengan target tahunan 100% belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
6. Lokasi yang Telah Dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Padang dengan target tahunan 3 Lokasi belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPRL Padang dengan target tahunan 70 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPRL Padang dengan target tahunan 71,75 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPRL Padang dengan target tahunan 89,5 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPRL Padang dengan target 81% telah mencapai 100% pada triwulan I 2026.
11. Laporan SPIP yang Disusun BPRL Padang dengan target tahunan 3 belum memperoleh capaian karena pengukurannya dimulai pada triwulan II 2026.
12. Indeks Profesionalitas ASN BPRL Padang dengan target tahunan 81 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
13. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPRL Padang dengan target tahunan 92 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
14. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BPRL Padang dengan target tahunan 1 inovasi belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPRL Padang dengan target tahunan 65 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
16. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPRL Padang dengan target tahunan 77% belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.

Berdasarkan uraian capaian tersebut, BPRL Padang telah mencapai seluruh indikator kinerja yang dijadwalkan pada triwulan I 2026 dengan persentase 120%. Hingga triwulan I 2026, transformasi dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang menjadi BPRL Padang belum komplet sehingga BPRL Padang belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran yang operasional. Atas dasar hal tersebut, BPRL Padang belum memiliki dokumen penganggaran sehingga belum ada realisasi anggaran yang dapat diukur. Selain itu, efisiensi terhadap penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target tersebut belum menunjukkan nilai akhir karena periode pengukurannya yang berlangsung tahunan.

4.2. Rekomendasi

Dalam perkembangannya, tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian target triwulan I 2026. Namun demikian, dalam upaya pencapaian kinerja periode selanjutnya, terdapat rekomendasi untuk memantau perkembangan kinerja secara berkala.

4.3. Tindak Lanjut Rekomendasi

Berikut disajikan rekapitulasi rekomendasi beserta tindak lanjutnya.

Periode Pelaporan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
Tahun 2025 (sebagai unit kerja BPSPL Padang)	Melaksanakan dialog kinerja sehubungan dengan adanya transformasi unit kerja BPSPL Padang menjadi BPRL Padang	BPRL Padang telah melaksanakan dialog kinerja yang diselenggarakan setelah apel pagi dalam menjalani masa transformasi unit kerja dari BPSPL Padang	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ukawpix2ufUoFIVBJ8K7rqyrSTp0_7qk

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BPRL Padang Tahun 2026



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PENATAAN RUANG LAUT (BPRL) PADANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rahmat Irfansyah**

Jabatan : Kepala Balai Penataan Ruang Laut Padang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

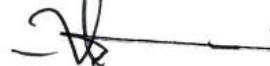
Jakarta, 11 Maret 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Penataan Ruang Laut
Padang



Rahmat Irfansyah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PENATAAN RUANG LAUT (BPRL) PADANG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPRL Padang	1.	Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja BPRL Padang (Kawasan)	2
		2.	Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja BPRL Padang (%)	80
		3.	Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja BPRL Padang (Kawasan)	1
2.	Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di di Wilayah Kerja BPRL Padang	4.	Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Padang (Nilai)	75
3.	Terlaksananya dukungan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPRL Padang	5.	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja BPRL Padang (%)	100
4.	Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Padang	6.	Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Padang (Lokasi)	3

3

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPRL Padang	7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPRL Padang (Nilai)	70
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPRL Padang (Nilai)	71,75
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPRL Padang (Nilai)	89,5
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPRL Padang (%)	81
		11.	Laporan SPIP yang disusun BPRL Padang (Dokumen)	3
		12.	Indeks profesionalitas ASN BPRL Padang (Indeks)	81
		13.	Nilai keterbukaan informasi publik BPRL Padang (Nilai)	92
		14.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada BLPRL Padang (Inovasi)	1
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal BPRL Padang (Nilai)	65
		16.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPRL Padang (%)	77

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	4.000.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PRL	1.000.000.000
Total Anggaran Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang Tahun 2026		5.000.000.000

Jakarta, 11 Maret 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Penataan Ruang Laut
Padang



Rahmat Irfansyah